MENDIDIK MANUSIA-MANUSIA MERDEKA

Oleh Daniel Dhakidae

PENGANTAR

TAK sering kali terjadi pendirian suatu sekolah menyebabkan pertikaian pendapat, cukup keras, dalam diskusi publik. Pada bulan Juli 1988 terjadi kontroversi tentang didirikannya sekolah menengah unggul di Magelang, yang pada waktu itu dikenal sebagai "Sekolah Bibit Unggul" dan kemudian secara resmi menjadi "SMA TARUNA NUSANTARA". Tujuannya, sebagaimana dibayangkan pada waktu itu, bagaimana menjadikan sekolah menengah itu sebagai lembaga penjaring bakat-bakat terbaik bangsa ini; menanam jiwa kebangsaan dan semangat ideologi Pancasila, dan seiring dengan itu sekolah ini diproyeksikan menjadi ajang di mana para calon pemimpin bangsa ini akan dididik --mirip-mirip dengan sekolah sejenis, terutama di tingkat akademi, yang dibikin di Meksiko oleh *Partido Revolucionario Institucional (Partai Revolusioner Institusional)*, untuk menjaring bakat-bakat terbaik di dalam partai dan mendidik mereka menjadi calon pejabat negara. Bisa juga dibandingkan dengan *Ecole Nationale*

d'Administration di Perancis, di mana *crème de la crème* dari elite pemimpin Perancis dididik dan para calon dan pejabat Perancis diajar bahwa tidak ada keutamaan yang lebih tinggi daripada mengabdi kepada negara.

Sekolah-sekolah seperti Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, APDN, dan Institut Ilmu Pemerintahan, IIP, tidak atau belum memiliki reputasi teknik dan wawasan yang tinggi seperti itu. Dua sekolah tersebut juga tidak direncanakan menjadi sekolah kaum pilihan. Sekolah, akademi, perguruan tinggi itu lebih menjadi sekolah dinas daripada sekolah kaum pilihan.

Jalan pikiran pendirian sekolah bibit unggul kira-kira sebagai berikut. Kalau di Angkatan Bersenjata ada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, bagaimana mendirikan sesuatu dengan kualifikasi sama untuk kaum sipil. Namun, sebelum sampai ke sana didirikan suatu sekolah khusus setingkat sekolah menengah atas. Untuk keperluan itu didirikanlah "Sekolah Bibit Unggul."

Kontroversi pun timbul. Kontroversi ketika itu berkisar pada pertanyaan-pertanyaan: mengapa harus didirikan sebuah sekolah menengah yang begitu eksklusif? Masalah lebih ruwet adalah bagaimana menentukan bahwa seorang anak itu "sangat berbakat"? Semakin sulit lagi bagaimana menentukan bahwa seorang anak itu sangat berbakat, dan sekaligus benar-benar "penganut Pancasila dan seorang nasionalis" sejati!

***

Bagaimana asal-usul sekolah tersebut? Usul membangun sekolah itu tercetus pertama kalinya ketika ada perayaan hari

kebangsaan tanggal 20 Mei 1985 di Pendopo Taman Siswa, Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut maka dari pihak militer dibentuk Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman. Pada pihaknya Taman Siswa mendirikan Yayasan Kebangkitan Nasional. Kedua yayasan itulah yang bersama-sama --yang pertama dari segi finansial dan sarana fisik; yang kedua dari segi sarana pendidikan dan kurikulum-- mendirikan sekolah bibit unggul dengan nama resmi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara di atas kampus seluas 14,5 hektar yang diberi nama "Kampus Perguruan Taman Taruna Nusantara" (PTTN) di Magelang. Dana yang disiapkan untuk membangun dan menyiapkan sekolah ini kira-kira 17.5 milyar rupiah. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1990 sekolah itu diresmikan oleh Jenderal Try Soetrisno. Dalam pidatonya Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu berkata tentang perlunya suatu jenis pendidikan yang disiapkan dan dikelola secara sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kader-kader perjuangan pembangunan bangsa yang Pancasilais, memiliki budi pekerti yang luhur serta tingkat penguasaan profesionalisme yang mantap, ditopang oleh kadar kepejuangan yang tangguh serta wawasan kebangsaan yang bulat dan utuh dengan spektrum yang luas dan jangkauan dimensi jauh ke depan.

Pada hari peresmian itu 281 siswa sudah siap belajar. Sedangkan proses pencarian bakat sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelumnya dan berlangsung sebagai berikut. Setiap propinsi bahkan setiap kabupaten mengirim "putra-putri terbaiknya" untuk belajar di SMA Taman Taruna Nusantara. Hasilnya bisa dilihat berikut ini. Pada tahun sekolah 1990-1991 tercatat 281 siswa mengikuti pendidikan. Angka ini merupakan

hasil akhir saringan terhadap 9000 calon yang dikirim. Pada seleksi di daerah tingkat dua 3000 calon berhasil lolos; pada seleksi di daerah tingkat satu 560 berhasil lolos. Dalam seleksi terakhir 281 itulah yang lolos. Pemilihan staf pengajar, yang di sana disebut pamong, juga berlangsung dalam seleksi ketat. Sejumlah 223 yang mencalonkan diri dan akhirnya diterima hanya 28 pamong.

Komposisi para murid kira-kira sebagai berikut. Aceh, 6; Medan 7; Padang 11; Jakarta 21; Semarang 30; Surabaya 41; Yogyakarta 12; Manado 5; Biak 4; Dili 3. Dari segi daerah asal tidak banyak hal yang menarik perhatian selain dominasi Jawa yang tetap besar. Latar belakang sosial orang tua mereka: dari keluarga militer 48; pegawai negeri militer 9; pegawai negeri sipil 65; petani 46; pengusaha swasta 47; pegawai desa 3; pendeta 3; buruh 6; guru 28; dokter 3, dan sopir 1. Dengan demikian mereka yang berasal dari lingkungan pegawai negara berjumlah: 122. Sedangkan mereka dengan kategori pekerjaan dan profesi bebas, termasuk guru dan dokter, adalah 134; sedangkan 24 lainnya tidak tercatat.

Yang juga menarik perhatian adalah profesi mana yang diingini para bibit unggul ini setelah tamat dari sekolah unggul itu. Yang inginkan profesi militer 146; dokter 30; insinyur 71; ekonom 8; guru 14; petani 1; pendeta 1; pegawai negeri 3 dan 8 yang lain tidak tercatat. Jadi bisa dilihat di sini kalau sekiranya ada 8 profesi yang diinginkan maka separuhnya yaitu 53 persen ingin menjadi tentara; sedangkan yang ingin terjun ke dalam profesi teknis bebas, seperti dokter dan insinyur, 37 persen; dengan kata lain 90 persen menginginkan profesi teknis milik negara dan bebas, dan selebihnya memilih profesi lain lagi. Pada tahun 1994 ini sekolah bibit unggul itu sudah

menghasilkan alumni-alumni pertama.*

***

APA arti sekolah jenis itu bagi Indonesia secara keseluruhan dan bagi dunia pendidikan khususnya adalah kira-kira masalah yang mau dipersoalkan wawancara yang saya lakukan dengan Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya. Wawancara yang mengambil momen "Sekolah Bibit Unggul" itu ternyata berkembang bebas dan meluas ke pelbagai hal dasar politik, ekonomi, dan pendidikan yang memungkinkan lahirnya dan berkembangnya ide semacam itu.

Hasil wawancara itu menurut rencana akan diterbitkan di harian *Kompas* untuk menyambut 17 Agustus 1988. Namun, karena bahan wawancara pada waktu itu dianggap "eksplosif" naskah tersebut tidak pernah diterbitkan. Kalau pun jadi terbit pada saat itu, maka penerbitannya hanya separuh dari hasil wawancara. Kini, wawancara yang berlangsung enam tahun lalu, yang memakan waktu setengah hari di pastoran Jetis, Yogyakarta, bulan Juli 1988 diterbitkan secara lengkap seperti apa adanya.

Memang, setelah dilihat isinya maka wawancara itu seperti baru dibuat minggu lalu saja. Isyu kebangsaan yang kini menyita halaman-halaman surat kabar dalam wawancara itu dipersoalkan sampai ke akar-akarnya. Suratan takdir sudah digariskan bahwa hasil wawancara itu diterbitkan untuk menyambut ulang tahun Romo Mangunwijaya yang ke enampuluh lima pada tahun 1994.

---

*Semua data diambil dari *Kompas*

***

Daniel Dhakidae (DD): *Isu yang baru saja dilontarkan kelihatannya seperti suatu kebetulan. Tiba-tiba jatuh dari langit. Sekonyong-konyong orang dengar adanya rencana mendirikan Sekolah Bibit Unggul.*

Yusuf Bilyarta Mangunwijaya (YBM): Ndak! Ndak! Tidak jatuh dari langit. Bagi saya itu adalah salah satu buah dari logika kaum pemimpin sekarang. Mereka mempunyai logika sendiri mengenai yang disebut **nasion**, mengenai pembangunan bangsa, juga tentang yang disebut kemajuan. Logika ini menghasilkan buah. Dan Sekolah Bibit Unggul ini salah satu buahnya, karena ada buah-buah lain yang serupa. Dalam jalan logika militer atau filsafat rekayasa sosial mereka, saya tidak heran.

DD: *Dengan kata lain ini lebih merupakan hasil sesuatu perkembangan yang cukup lama. Ia hidup tapi tidak disadari. Malah yang ngomong pun, mungkin tidak sadar bahwa itu ...*

YBM : Ya! Itu semua bisa dikembalikan pada akar-akar cita-cita lama mengenai *Indonesia Raya.* Sekarang tidak ada lagi istilah Indonesia Raya sebagai suatu konsep resmi. Tetapi konsep itu ada sejak permulaan pergerakan nasional pada masa Belanda. Khususnya dalam diri Sukarno dan para pemimpin nasional tertentu selalu hiduplah cita-cita Indonesia Raya. Lagu kebangsaan kita pun jelas: *Indonesia Raya.*

Dulu memang ada iklimnya. Kita dengar adanya Britania Raya, Perancis Raya, Jerman Raya, Nippon Raya, Asia Raya, dan sebagainya; demikian juga Indonesia Raya. Akhirnya, bagi banyak pemimpin nasional kita yang terkagum-kagum atas prestasi Dai Nippon mengalahkan tuan-tuan Barat, (dulu secara militer, sekarang secara ekonomik), khususnya yang me-

ngenyam pendidikan tentara PETA, Pembela Tanah Air, tumbuhlah keyakinan bahwa Indonesia Raya hanya bisa dicapai dengan mempelajari Jepang. Jepang bagi mereka adalah *master* dalam strategi menuju ke pembentukan negara kuat. Kalau kamu mau maju, menjadi super modern, tidak kalah dengan negara Barat, tetapi sebagai negara Timur mempertahankan kebudayaan pribumi, maka tidak ada cara lain kecuali berorientasi ke teladan Jepang.

Dulu belum ada sebutan *Japan Incorporated*. Tetapi realitas sosial ekonomik di sana selalu berdasarkan sistem *Zaibatsu*, yakni aliansi antara kaum militer, kaum teknokrat, kaum birokrasi feodal, dan kaum modal seperti Mitsui, Mitsubishi, dan sebagainya. Jepang Raya itu cita-cita dan hasil usaha kaum samurai rendah. Yang membangun Jepang itu bukan samurai tinggi, kaum istana tinggi yang sudah jadi boneka-boneka istana, melainkan para samurai rendah. Kaum samurai rendah itulah yang dengan segala patriotisme dan segala energi mereka membuat Jepang menjadi Jepang sekarang, lewat peristiwa sejarah yang disebut *Meiji Restoration*.

Golongan pemimpin kita yang sekarang ini, saya tidak tahu apakah sadar atau tidak sadar, juga ingin begitu. Mereka ingin membuat suatu Indonesia Raya, *Indonesia Incorporated*, mirip yang orang sebut "Japan Incorporated"; artinya bukan cuma negara, tetapi juga perusahaan raksasa dengan segala *social-engineering* yang *integrated* penuh.

Analisis saya ini sudah pernah saya cek kepada Letnan Jenderal Sayidiman, ketika bertemu di dalam suatu seminar yang diselenggarakan oleh koran Sinar Harapan. Saya tanya: "Pak Sayidiman, ini dan ini, itu dan itu, kok ada paralelisme yang kuat antara Jepang zaman pendudukan dan Orde Baru

ini. Betul?" Pak Sayidiman tidak bisa menjawab segera. "Tunggu dulu, saya pikir dulu." Setelah pergi untuk berpikir-pikir agak lama beliau kembali dan menjawab: "Betul! Analisis Romo itu betul. Tetapi, saya kira, secara tidak sengaja. Bukan karena generasi kami belajar sistematis secara kelompok dari Jepang dan meniru mereka." Bagi saya kesaksian Pak Sayidiman sudah cukup. "Tidak meniru. Tetapi *circumstances*-nya sama". Secara implisit beliau membenarkan analisis: Memang paralelisme itu betul ada. Karena logikanya sama.

DD: *Logika mana?*

YBM: Logika bagaimana membuat suatu Indonesia Raya di dalam zaman ketika kita dikitari *super-powers*, negara-negara adi-kuasa dan *multinational corporations;* dan di dalam hubungannya dengan modernisasi, kemajuan, dan sebagainya. Letnan Jenderal Sayidiman memang tidak mengatakan: logika. Tetapi hanya mengatakan: "bukan karena kita meniru Jepang, lalu kita menerapkan teori dan praktek Jepang namun karena *circumstances*-nya sama, sehingga penanganannya (ipoleksosbudaghankamling; *YBM*) pun sama.

DD: *Tapi kalau diteliti lebih jauh, akan kelihatan bahwa* ***circumstances****-nya juga tidak sama. Jepang yang datang ke sini adalah Jepang masa perang yang datang setelah mengalami kemerosotan, baik militer maupun kapital.*

YBM: Beliau (Sayidiman; *DD*) dalam aspek lain memang juga salah. *Circumstances* kita berbeda sama sekali dari Jepang zaman Meiji dan era Perang Dunia I-II. Kesimpulan yang saya ambil ialah, bahwa secara implisit yang dimaksud Letjen Sayidiman ialah: "*logika*-nya sama." Tapi dia bilang: "*circumstances*-nya sama." Tapi ini analisis saya. Nah, yang penting

adalah bentuk logika tersebut.

DD: *Logika dalam arti bahwa perkembangan akan berjalan sebegitu rupa menurut suatu pola penalaran tertentu sehingga akan menjadi semacam keharusan.*

YBM: Betul! Dalam konsepsi angkatan 45 digariskan secara sadar atau tidak sadar: kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau modern, maka itu harus dijalankan, pakai cara Jepang. Tentu saja tidak akan pernah dikatakan bahwa Indonesia ingin meniru Jepang.

DD: *Kalau dilihat psikologinya, di sana ada semacam ketidaksabaran elite terhadap semua yang berlaku di lapisan paling bawah.*

YBM: Ya! Anda benar.

DD: *Tidak sabar terhadap kelemahan, tidak tahan melihat kebodohan, dan tidak tahan melihat segala yang bersifat lamban. Jadi inilah psikhe generasi tahun 45, satu lapisan yang kini menjadi elite. Tetapi, di pihak lain Jepang mengajarkan suatu populisme dalam praktek, yang bertolak belakang dengan Belanda, karena Belanda lebih berorientasi elitis, sebagaimana terutama dilihat dalam pendidikan.*

YBM: Populisme Jepang? Apa maksudnya? Kalau pun itu ada, itu hanya populisme sebagai taktik. Kalau yang dimaksud populisme taktik, nah itu betul.

Saya ingin mengupas ketidaksabaran itu. Salah satunya ialah karena mereka tidak belajar sejarah. Sungguh ada suatu diskontinuitas antara generasi 45 umumnya dan generasi 1928 yang intelektual, yang belajar sejarah, psikologi, sosiologi, indologi, antropologi, belajar ekonomi, apa itu kapitalisme dan apa itu marxisme dan sebagainya. Generasi 28 atau generasi pendiri RI kita juga menginginkan Indonesia yang gemilang, tetapi bukan negara polisi. Guru-guru mereka

kaum humanis, walaupun sistemnya kolonial. Sedangkan generasi 45, guru-gurunya militer. Suasananya militer, dikursus hanya kira-kira dua tahun, sehingga logikanya pun logika militer. Logika militer di mana-mana di seluruh dunia dan segala zaman adalah sama: "Jika kau ingin merebut sesuatu sasaran, maka harus rela menderita korban. Titik. Jangan menangis! Ada sasaran ada korban." Juga: "Tembak dulu sebelum kau ditembak! Kalau Anda omong dengan orang militer, mereka tidak pernah bicara tentang efisiensi. Seorang kolonel pernah bilang kepada saya: "Di kalangan kami istilah efisiensi tidak dikenal. Yang penting bagi kami: efektif. Dengan korban apa pun yang setara." Misalnya jembatan harus direbut. Korban yang dikalkulasi: Satu kompi mati. Titik. Dus, efisiensi tidak ada, karena sebetulnya korban satu jiwa sudah amat mahal bagi seorang humanis. Yang ada, ke-efektif-an. Dan *leadership* hanya ada pada panglima dan staf jenderal dalam mengelola logistik, strategi, dan lain-lain. Bawahan harus taat total pada komando. Ini logika militer di mana pun.

DD: *Tetapi di sini terlihat ada suatu paradoks antara kepemimpinan dulu, yang bagaimana pun itu hasil dari politik etis Belanda. Belanda tidak sadar bahwa pendidikan itu itu telah menjadi suatu nemesis. Pendekatan pendidikan Belanda yang elitis menghasilkan kelompok nemesis yang populis, sangat populis yang berpikir untuk kalangan bawah. Nah Jepang kelihatannya seperti populis dalam praktek, tetapi menghasilkan sesuatu yang pada dasarnya "elitis" dalam tindakan.*

YBM: Anda mengatakan Jepang populis itu, dalam arti apa?

DD: *Dalam arti* ***political recruitment*** *yang dilakukan oleh Jepang. Belanda tidak pernah mau memperkenalkan atau memberikan suatu kekuatan yang sifatnya militer kepada Indonesia. Baru kemu-*

dian, untuk membela kepentingan Belanda, dibentuk KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) untuk membela Hindia Belanda yang milik Belanda.

Tetapi Jepang memperkenalkan dan memberikan pola militer itu, bukan untuk "membela Jepang" tetapi untuk "membela tanah air", dengan menjadikan orang-orang Indonesia sebagai prajurit, meski dalam perkembangan sekarang ini justru menjadi elite. Sedangkan Belanda mulai dengan orang-orang dari atas, dengan mendidiknya melalui sekolah, masuk universitas, tetapi justru orang-orang hasil didikan jenis elite inilah yang berkembang jadi lebih populis.

YBM: Kalau itu yang terjadi maka mungkin lebih karena tadi itu: *circumstances*. Jepang datang ke Indonesia, dalam konteks ia tengah berperang di seluruh Pasifik. Dia punya orang sangat sedikit, apa lagi Tentara Jepang di Indonesia, sangat sedikit. Jadi, dia harus mencari suatu sistem, bagaimana dengan tentara yang sedikit, dia dapat menguasai sekian puluh juta orang, dalam situasi arkipel kepulauan mahaluas yang baru dihantam oleh Sekutu. Maka dia terpaksa mengambil sebanyak mungkin orang-orang yang bisa dia pakai. Teristimewa, Jepang menciptakan sistem khas Jepang: *Tonarikumi*, Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK) atau Rukun Wilayah (RW) dan Rukum Warga (RW). Ini adalah penemuan Jepang yang paling jenial. Keamanan dengan sistem RT, RW warisan Jepang yang kita lakukan sekarang, adalah suatu sistem ampuh untuk mengontrol dan mendisiplinkan rakyat sampai ke akar-akarnya.

Di Amerika Latin saya pernah tanya kepada suatu komunitas yang sedang membangun mandiri permukiman mereka. Mereka bisa membentuk RT-nya sendiri dan RW-nya, serta memilih sendiri Ketua RT-nya. Saya tanya kepada mereka,

"Bagaimana kalau ada intel pemerintah yang datang menyamar di sini, lalu berinfiltrasi di kalangan kalian, bagaimana?" Mereka bilang: "tidak mungkin! Kalau ada mata-mata pemerintah datang ke sini, dalam tiga hari saja dia sudah ketahuan dan akan mati dibunuh."

Saya membandingkan: di Indonesia hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Amerika Latin bisa begitu karena mereka belum memakai sistem tonarikumi a la Jepang tersebut. Ini suatu sistem jenial luar biasa, di mana tentara Jepang dengan tenaga yang sangat sedikit mampu menguasai Indonesia yang mahaluas dan kompleks.

Belanda lain. Mereka mendatangkan atau mendidik tenaga-tenaga ahli untuk ekspor, sistem produksi, manajemen sosial ekonomi *Pax Neerlandica* untuk seluruh Nusantara lewat gubernur-gubernur yang antropolog, sosiolog, ekonom. Gubernur Irian, Dr. Van Baal, Gubernur Surabaya, Dr. Van der Plas, Gubernur Surakarta Dr. Orie, Gubernur Yogyakarta Dr. Adam, dan jangan lupa: Dr. van Mook ekonom dan Dr. Snouck Hurgronje antropolog penakluk Aceh. Hasil bagi mereka: gemilang. Tetapi memang ada benarnya paradoks: pemimpin yang dididik Belanda menjadi populis padahal mereka itu priyayi didikan kolonial, sedangkan hasil didikan para samurai rendah malah menjadi elitis sekali. Tapi ini sama dengan di Jepang. Kalau saya lihat sejarah Jepang, pada zaman Meiji, sebetulnya sebelum Meiji juga: yang menang itu kaum Samurai rendah. Mungkin karena mereka dari kalangan rendah itulah mereka waktu itu belum mempunyai kekuasaan dan masih segar bugar. Dengan patriotismenya mereka mencapai Jepang modern.

Agaknya ini sama dengan jenderal-jenderal kita yang di-

didik di PETA itu. Merëka mempunyai situasi psikologis yang sama. "Circumstances sama", menurut Letjen Sayidiman tadi. Ketika raja-raja, sultan-sultan dari masyarakat atas tradisional lama tidak lagi berselera dan mampu memerdekakan dan membangun bangsa, maka yang tampil maju boleh dikatakan kaum keturunan rakyat biasa tetapi punya ideal dan unsur priyayi. Ya mungkin juga rakyat-jelata, tetapi di Indonesia rakyat-jelata yang masih entah guru, entah pegawai atau terpelajar. PETA ini penuh dengan indoktrinasi semangat samurai. Mereka dulu tidak banyak belajar ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, etnologi dan sebagainya. Mahaguru mereka adalah opsir-opsir Jepang dan pengalaman perang di lapangan.

DD: *Mereka ini tidak didukung oleh suatu pendidikan yang tinggi di belakangnya. Tapi ada dua hal yang mendorong mereka ini. Pertama, perkembangan modal di Indonesia; dan kedua, teknologi sebagai penyerta modal, yang mengharuskan orang-orang ini berpikir begitu. Dan di situ saya lihat mengapa ada ketidaksabaran. Tidak ada tuntutan modal selain makin membesarkan teknologi. Tidak ada tuntutan teknologi selain agar perkembangan menjadi semakin cepat, semakin tinggi, semakin canggih. Dua tuntutan ini hanya mungkin kalau ditanggapi oleh pemimpin kelas unggul yang mampu menarik yang lamban.*

YBM: Masalahnya sebetulnya lebih kompleks dari itu. Tetapi antara lain ketidaksabaran itu muncul karena mereka tidak sempat belajar tentang proses evolusi, tidak berpikir historis atau memahami proses budaya manusia dalam konteks historis. Hanya dengan mempelajari manusia dalam konteks historis, sosiologis, antropologis, bahasa, baru kita paham manusia dan budayanya jalan pikir dan cita rasa terdalamnya apa sebenarnya.

Tetapi mereka ulung dalam cara bekerja lebih secara instinktif berdasarkan pengalaman. Misalnya: Mereka katakan, "Indonesia tidak akan kami jadikan negara yang militeristis." Tetapi mereka tidak pernah belajar bahwa Jepang dulu yang menjadi contohnya itu punya partai-partai dan parlemen juga, tetapi nyatanya diktatur militer. Prasyarat-masyarakat yang harus ada untuk jadi negara tidak militeristik tidak pernah mereka pelajari. Jadi katakanlah: mereka ini pada mulanya prajurit-prajurit kecil biasa, lalu menang... menang... menang lagi, dan masuk ke dalam kalangan tinggi. Modalnya hanya intuisi, bahwa rakyat Nusantara ini, khususnya orang Jawa, harus ditangani khusus. Demokrasi gaya Hatta-Sjahrir bagi mereka omong kosong belaka. Seperti dikatakan banyak kalangan pedagang "Jika orang Jawa mau maju, mereka harus dipukul." Kalau kamu menunggu musyawarah, ya enggak akan jalan. Maka kita lihat: Kumpulkan saja anggota MPR, berikan GBHN yang telah selesai, nanti mereka akan bilang: *"Nun Hinggih!"* (Ya, demikianlah; *DD*.). Jadi, mereka mempunyai sistem "sosiologi" alamiah berdasarkan naluri. Ini mengagumkan. Dan mereka sering berhasil, dari segi *effectiveness* tadi. Bukan *efficiency*! Ternyata mereka bisa melakukan *social-engineering* yang cukup ketat dan berjalan lama.

Hal-hal kecil mungkin lebih berbicara. Saya sendiri sering bertanya diri: sebenarnya siapa gerangan pencipta *social-engineering* penghadiah berbagai bintang-bintang dan anugerah-anugerah itu? Lihat saja praktek upacara-upacara pemberian bintang dan pahala itu. Dulu *enggak* ada. Di jaman Orde Lama tidak ada atau jaranglah. Di zaman Jepang pun tidak ada. Logika dan rekayasa pemberian bintang dan anugerah di mana-mana pada hakekatnya sama, untuk menguasai. Ini *social and*

political engineering yang sudah teruji di sepanjang zaman di mana-mana.

Begitu juga lomba-lomba Adipura misalnya, itu siapa ya otak di baliknya yang mempunyai ide gemilang seperti itu? Seandainya saya ilmuwan, saya pasti akan membuat riset siapa *sih* di Indonesia pencetus ide penganugerahan bintang-bintang dan lomba-lomba tersebut? Sebab, itu sistem rekayasa sosial yang amat pintar dan efektif.

Lalu tentu saja soal pakaian seragam. Semua harus seragam. Dharma Wanita dan organisasi serta kelompok apa pun seragam; dan sebagainya. Ini *kan* suatu *social engineering* yang pintar sekali. Orang Barat tidak pernah memahami ini. Kecuali Jerman Hitler, Italia Musolini, dan Soviet Rusia Komunis serta kaum militer tentu saja. Bagi orang Barat soal pakaian seragam masalah sepele memang, hari Senin harus pakai baju Korpri, hari Jumat harus pakai baju Hansip, ini seolah-olah soal sepele. Tetapi ini sebenarnya *social engineering* massa yang hebat sekali. Mengagumkan. Sungguh terapan *behaviour engineering* terselubung yang hasilnya mengagumkan, yang sekarang dalam toko-toko besar digunakan untuk para buruh mereka.

DD: *Kalau kita bicara tentang social engineering ini, kan tidak bisa lepas dari konsep pemimpin dari kaderisasi "bibit unggul" tadi. Kelihatannya seperti kebetulan, tetapi sebenarnya social engineering pemimpin bibit unggul adalah memang sesuatu yang berada dalam jalur yang diingini.*

YBM: Persis! Logikanya adalah: jangan menunggu sampai masyarakat melahirkan sendiri pemimpinnya. Ya tadi itu: logika "tembak dulu sebelum kau ditembak." Efektif!

DD: *Social-engineering hanya bisa berlangsung kalau didu-*

kung satu sikap utama yaitu disiplin. Disiplin dalam arti tidak memungkinkan pilihan lain, tidak memberikan alternatif. Pilihan tertentu sudah diberikan. Itulah yang mau ditegakkan secara sungguh-sungguh.

YBM: Tentu. Tapi disiplin yang dimaksud sayanglah bukan disiplin kerja di laboratorium, misalnya. Disiplin di sini dalam arti disiplin batalyon, kompi. Nah itu disiplin. Jadi, walau bagaimana pun logikanya adalah logika militer.

DD: *Saya pikir tidak setepat dan sejelas itu. Tidak ada komando, yang lantas menuntut suatu kepatuhan. Dengan kata lain disiplin di sini bukan dalam arti kepatuhan pada aturan tetapi disiplin dalam arti sikap submissive, sebagai resultante dari tesis dan antitesis pelaksanaan kekuasaan, dan disiplin sebagai hasil pengejawantahan power, kekuasaan.*

YBM: Anda benar. Ya, POWER, kekuasaan yang elitis sekali. Dari pihak satu: yang bertugas memikir, mengarahkan, mengomando ialah Panglima, *general staff*, komando bidang strategi, logistik. Lainnya tinggal taat melaksanakannya. Tetapi di pihak lain: *Submission* itu. Di sini rekayasa sosial sekarang juga didukung oleh pengalaman. Tanpa kekuasaan yang dijalankan secara keras, lihat Philipina, apa nasibnya sekarang! Lihatlah India, Pakistan, apalagi Amereka Latin.

Indonesia lain. Lihat, sekarang Indonesia mendapat bantuan dari IGGI (sekarang CGI – Red.) lebih dari empat milyar dollar. Efektif! Mereka itu yakin, setelah melihat prakteknya, bahwa hanya dengan gaya tangan besi bisa maju. Seandainya pemimpinnya itu bergaya-gaya Soekarno, tidak mungkin dapat bantuan sebesar itu. Ini strategi berdasarkan pengalaman jenius sebetulnya. Hanya bagi mereka yang percaya pada Sila ke-2 dan ke-5: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sungguh itu mempri-

hatinkan sekali.

DD: *Kalau misalnya kita membayangkan ada suatu grand-design, tentunya ini semuanya jenial.*

YBM: Ya, jenial. Tapi jangan keliru. Ada pertanyaan lain yang sama absahnya: apakah ini serba kebetulan? Ataukah semuanya adalah resonansi dari sumber suara yang sama, dari mesin yang sama, sehingga semua ini menjadi "biasa" saja? Orang Barat selalu berpikir dalam kerangka *grand-design*. Orde Baru yang berhasil pun dilihat sebagai hasil *grand-design*. Ada korupsi memang, tapi semuanya jalan.

DD: *Tetapi saya pikir bisa dijelaskan sebagai berikut kalau itu hasil suatu grand design, saya pikir luar biasa. Tetapi kalau kita tidak percaya dengan teori itu?*

YBM: Saya juga tidak percaya akan adanya *grand-design*. Letjen Sayidiman betul. Tetapi kalau memang tidak ada suatu *grand-design*, mungkin bisa dijelaskan dengan teori "batu dicemplungkan ke kolam". Sekali batu jatuh di air, muncullah gelombang-gelombang yang susul menyusul dalam irama yang sama. Dengan kata lain, *leadership* kita memang mengenal baik macam apa airnya. Dia berbuat sesuai dengan potret nyata Manusia Nusantara.

DD: *Saya pikir secara naluri dia paham sekali bahwa...*

YBM: Orang sini harus dibegitukan! Ditangani keras.

DD: *Perbedaannya, Angkatan 1928 mampu menempatkan kemerdekaan individu dalam suatu grand-design yang kolektif nasional. Sedangkan angkatan 1945 hanya mau melihat grand-design, lantas mereka menuntut bahwa semuanya harus berjalan ke sana dalam suatu garis lurus.*

YBM: Juga tidak penuh seperti itu. Soekarno pun ingin jadi *grand-designer*. Cuma ia bukan orang yang menghormati

detail. Mohamad Hatta lebih paham tentang praksis detail dalam keseluruhan. Tapi *paradigma, visi manusia* itulah yang pokok. Visi para pendiri RI kita datang dari iklim humanisme politik etik Belanda yang kendati pun kolonial demi kaum penjajah, akan tetapi para guru dan mahaguru Belanda mengajar tentang manusia demokratik, perang kemerdekaan Belanda 80 tahun melawan penjajah Spanyol, sikap *fair play* dan kemanusiaan dan sebagainya. Harus dibedakan antara *pemerintah* Belanda dan para *guru* serta *mahaguru* Belanda di sekolah. Humanisme lewat Generasi 28 itulah yang kemudian ikut mengendap dalam Sila ke-2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Orang-orang Generasi 28 percaya pada kemanusiaan dan peri kemanusiaan. Ketika mereka mencita-citakan suatu negara, *a priori* mereka menolak negara polisi atau rekayasa model fasis. Basis mereka adalah menciptakan negara yang bisa membuat **manusia** Indonesia menjadi **manusia merdeka**. Makanya kata-kata kuncinya adalah *kemerdekaan, musyawarah, ekonomi koperasi*. Ini mengandung konsep tentang manusia.

Generasi 1945 juga punya konsep tentang manusia tetapi lain. Konsep manusianya bukan *human persons* melainkan **sub-ordinates**. Maka sikap mereka: "Kalau kamu ingin maju, ikutlah saya! Kamu pasti akan mendapat televisi, listrik. Saya dan kawan-kawan saya sedang membuat kue besar-lezat dulu. Nanti bereslah, kamu akan mendapat bagian. Asal saja taati saya mutlak!" Dengan kata lain, ketaatan pada suatu *grand design tertentu*.

DD: *Tetapi justru di situ juga letak soalnya. Angkatan dulu (1928) begitu percaya pada visi dan menjadi orang-orang visioner, tanpa mekanisme untuk mencapainya. Apa hasilnya? Mereka melahirkan suatu kondisi yang sama sekali di luar visi itu: anarki tahun-*

tahun 1950-an dan 1960-an, misalnya. Generasi yang sekarang memerintah saya pikir tidak terlalu perduli dengan visi itu.

YBM: Situasi yang dihadapi Generasi 28 lain sekali. Waktu itu segala-gala masih nol. Tetapi aneh memang. Juga tragik! Pimpinan generasi pertama yang begitu manusiawi justru melahirkan generasi yang tidak paham tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, pemimpin yang tidak begitu pusing dengan masalah kemanusiaan itu justru berhasil memberikan kondisi yang *liveable*. Tapi kondisi yang punya paradigmanya sendiri. Para pemimpin generasi lama (1928) memang kaum terpelajar. Bagaimana pun mereka intelektual, dan bercita-cita agar rakyat jadi manusiawi juga, seperti mereka sendiri, manusiawi, adil, beradab.

Sedangkan yang sekarang ini tidak begitu pola pikirnya. Praktis-pragmatis: bekerja dengan apa adanya. Jadi kalau orang Indonesia itu nyatanya bermental kuli, ya perlakukan dia sebagai kuli. Logis! Jangan perlakukan seorang kuli atau seorang babu itu sebagai orang intelektual. Itu mimpi. Enggak Bisa! Harus dipukul, baru ia maju.

DD: *Tetapi yang berkesan, orang-orang dulu itu punya visi tapi tidak pernah mampu menciptakan kondisi yang cocok untuk itu. Tetapi yang sekarang, taruhlah tidak punya visi, namun nyatanya mampu menciptakan kondisi yang menyebabkan seorang berpikir ...*

YBM: Yang sekarang pun punya visi. Tetapi lagi: Ini masalah cita-cita dan filsafat tentang manusia dan masyarakat. Cita-cita generasi 1928 itu lain dari cita-cita generasi kaum 1945. Jadi *mensbeeld*, citra manusia, dan ide mengenai manusia sejati, dan masyarakat baik, itulah yang berbeda.

Sering kepada orang yang mampu berpikir kritis saya katakan: yang kita alami sekarang ini *kok* rasanya bukan *Repu-*

blik Indonesia 17 Agustus 1945. Bukan Indonesia dengan Undang-undang Dasar 1945. Dan bukan lagi Republik Indonesia dengan Pancasila seperti yang dimaksud *Founding Fathers* kita. Contohnya? Orang berbicara tentang UUD 45. Namun orang lupa bahwa Undang-undang Dasar mengatakan: kekuasaan tertinggi di dalam negara kita adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Tetapi yang kita saksikan dan kita alami: MPR tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi kekuasaan tertinggi itu bukan MPR.

DD: *Apa* mensbeeld *mereka?*

YBM: Campuran. Mengambil *mensbeeld* pribumi feodal dan Jepang. Bagi kaum 45 itu yang penting adalah BANGSA Indonesia, Indonesia Raya. Jadi Sihotang, si Pakpahan, dan si Harahap itu tidak penting. Yang penting adalah Indonesia Raya. *Indonesia Incorporated* itu adalah ide dasarnya. Semua orang harus menjadi satu kelompok yang super-kelompok. Ada yang menjadi manajer, tetapi ada juga yang harus jadi kuli dan sebagainya.

Artinya, kembali kepada kolektivisme. Bahkan berbagai praktek ekstrimnya sebetulnya justru meniru model komunis yang sekarang, 1988 (waktu itu Uni Soviet belum pecah; tembok Berlin belum runtuh *DD*.). Jadi *de facto* sebenarnya banyak justru praktek *a la komunis*. Banyak contohnya. Makanya mereka alergi sekali terhadap komunisme, soalnya untuk menutupi mereka sendiri menjalankan komunisme faktual itu. Tidak konseptual tetapi *fungsional*. Citra manusia Generasi 1928 juga melihat pentingnya kolektivisme, tetapi tetap menjunjung tinggi martabat dan kemerdekaan pribadi dalam kerangka *fair play*. Sedangkan bagi kaum 1945, **pribadi** adalah praktis **demi negara**.

DD: *Bagaimana menjelaskan kemampuan untuk mempertahan-*

kan disiplin itu? Saya teringat pada suatu konsep teknologi yang kuat sekali dari seorang filosof Inggris abad lalu, Jeremy Bentham, mengenai penjara. Di sana ada suatu sistem pengawasan dengan bantuan teknologi cahaya. Dia namakan itu panoptikon. *Si pengawas yang mengendalikan* panoptikon, *bisa mengawasi gerak-gerik semua orang di dalam penjara, di dalam setiap kamar, karena ada satu sistem cahaya satu arah yang kuat sekali. Dari dalam tidak bisa memperhatikan yang ada di luar karena nampak gelap karena pancaran cahaya yang kuat itu. Tetapi orang luar dapat melihat gerak-gerik orang yang di dalam secara keseluruhan. Ada kesejajaran di sini. Pakaian seragam, keseragaman berpikir yang dihasilkan penataran adalah bias-bias cahaya kontrol untuk mendisiplinkan masyarakat, mengontrol anggota-anggota individual masyarakat.*

YBM: Ada samanya, ada lainnya. **Panoptikon** itu sudah canggih, mungkin ilmiah. Disiplin Orde Baru ini sebenarnya lebih alamiah. Orang Nusantara, orang Jawa, sebetulnya dalam dirinya sendiri dan kebudayaannya nyatanya memang masih berkebudayaan kolektif sekali. Lebih suka pada kebersamaan dan kesamaan. Pribadi itu boleh dikatakan nol! Maka di dalam lubuk hati, yang dibayangkan adalah suatu kebersamaan di mana pribadi-pribadi itu hanyalah alat atau cuma "elemen", molekul.

Dan kedua, pengalaman mereka berkata: sebetulnya di dalam jiwa dasar praktis, massa rakyat itu masih kuli dan babu. Ratusan tahun penindasan bukan cuma dalam penjajahan Belanda, tetapi juga dalam feodalisme Mataram dan jauh sebelumnya, membuat mayoritas rakyat, massa, lebih berjiwa kuli, hamba. Lebih berbahagia menjadi hamba, menjadi klien dalam hubungan klien-patron warga masyarakat kolektif. Dijajah boleh, tetapi lebih aman. Nasib jadi pegawai yang dihisap boleh, asal digaji setiap bulan.

Dengan demikian, kalau ada *leadership* yang maunya sama ya... cocok! "Disiplin... Boleh! Disiplin untuk apa, bukan urusan saya." Jadi seluruh *psikhe masyarakat kita* itu ternyata adalah *psikhe* hamba. Jadi tidak secanggih tadi itu! Tidak perlu ada **panoptikon!**

DB: *Tetapi kalau melihat perkembangan institusi seperti RT, Rukun Tetangga, RW, Rukun Warga kan tidak lain dari cahaya atau mata untuk mengawasi kelakuan masyarakat?*

YBM: Itu yang perlu kita persoalkan. Ada kejadian berikut ini yang memberi ilustrasi betapa mereka itu bahagia sekali bila didisiplinkan! Contoh di Kali Code. Ini kan orang-orang, yang ya... katakanlah, **paria**. Suatu ketika kami bina mereka supaya bisa main kulintang. Akhirnya Pak Lurah tahu itu. Maka sekali waktu Lurah datang dan berkata: "Hebat! Nah, ini nanti Walikota akan datang, ayo... main kulintang. Untuk dipertontonkan!" Yang terjadi berikut ini interesan sekali untuk disimak. Orang-orang melarat itu berpikir: "Untuk main kulintang, harus ada seragam." Wah... bahagianya... luar biasa...! Soal *seragam* itu menjadi perbincangan yang berlangsung berhari-hari: apa warnanya, apa modelnya, dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Apa psikologi seragam ini untuk mereka? Jelas sekali: dengan pakaian seragam mereka merasa nasibnya *terangkat* dari status para *outcasts,* kaum buangan, menjadi warga masyarakat terhormat, kaum priyayi yang biasanya berpakaian seragam juga.

Hal yang sama terjadi di desa. Pernah ada orang desa naik sepeda ke kota. Saya tanya: "ke mana, Pak?" Jawabnya tampak bangga sekali: "Penataran!" Wah... penataran! Itu suatu kehormatan besar. Padahal, apa yang terjadi sebetulnya? Yang ikut penataran itu *kan* digiring sebetulnya. Dalam kon-

sep *mensbeeld* Hatta-Sjahrir: digiring. Tetapi bagi kaum kecil tadi, tidak semua memang, apa arti mengikuti penataran itu? Bukan main ... bahagianya! Orang yang tidak pernah diundang ke penataran, oh... sedihnya, nasib! Berapa pun kehilangan nafkah harian, yang hebat: asal ikut penataran. Ini tragedinya. Untuk cendekiawan dan pribadi-pribadi kuat dan berbudaya penataran adalah siksaan tetapi bagi masyarakat kuli dan babu penataran dan pakaian seragam sungguh suatu kehormatan. Ada dua hal yang memang sangat paradoksal.

DD: *Dalam gejala seragam dan penataran, di satu pihak, kelihatan ada sesuatu yang disebut emansipasi di dalam psikhe, akibat sosial-ekonomis itu. Di pihak lain berlangsung alam disiplin. Nah, bagaimana menjelaskan semua ini?*

YBM: Sulitnya, masyarakat biasanya terbatas horisonnya. Mereka belum mampu melakukan analisis sosial. Yang paling penting bagi mereka itu selalu berjangka pendek. Bahwa akibatnya nanti mereka harus kerja-bakti, kehilangan waktu cari nafkah dan sebagainya, tidak sampai pikirannya ke sana.

Ada lomba desa. Wah... mereka mati-matian menjaga nama desa. Manusia kolektifnya keluar. Manusia gerombolan, yang alamiah merasa di-*emansipasi*-**kan** kalau gerombolannya diangkat ke *level* gerombolan lebih tinggi. Tetapi kalau ini diharuskan bertubi-tubi dan lama-lama merasa berat menanggung biaya lomba desa, barulah mereka menggerutu. Namun melawan arus kolektivitas jarang yang berani.

DD: *Apakah di situ itulah letak logika seragam?*

YBM: Ya...! Karena, dengan pakaian seragam orang mengira dirinya terangkat ke dalam kaum elite. Ciri-ciri elite masa sekarang adalah pakaian seragam dan penataran itu. Coba kalau Anda setiap hari nonton televisi. Kalau ada penataran

'kan ada pidato. Bagi orang yang horisonnya pendek kesannya: Wah, ciri khas kaum tinggi itu pidato! Dan yang dengar pidato juga ikut jadi kaum tinggi. Maka masuk di televisi. Saya kok cuma di ladang saja!

DD: *Tetapi jangan lupa bahwa dalam lomba desa, dan perlombaan-perlombaan lain seragam itu masuk di dalam penilaian.*

YBM: Memang! Seragam, penataran, pidato! Misalnya seorang pemuka rakyat dusun miskin mendapat giliran berbicara pada suatu rapat pembentukan Usaha Bersama. Caranya begini: sebelum berpidato ia (berpakaian safari desa) kalem memakai kacamata dulu. Lalu mengambil secarik kertas dari saku jas, kemudian membuka lipatan kertas itu sambil membetulkan kertas begini... begitu...! Padahal dalam kertas tidak ada apa-apanya yang bisa dibacakan. Memakai dulu kacamata, mengambil kertas dari saku, itu upacara. Nah, ini suatu fenomena yang sama. Di mana-mana ada atribut-atribut tertentu yang ingin ditunjukkan bahwa "saya tergolong di sana." Jadi misalnya kalau berpidato, jangan seperti misalnya dalang. Dalang itu kan rakyat! Tetapi harus seperti Pak Harto! Kacamatanya dikeluarkan dulu, lalu bawa-bawa kertas. Meski tidak ada yang ditulis di kertasnya. Padahal kami tahu, ia lebih hebat bila berpidato bebas tanpa naskah. Tetapi apa boleh buat, pakai naskah, itu *kan* gaya kaum elit. Semua tadi adalah bagian dari logika manusia gerombolan.

Saya tidak menyalahkan pemuka dusun itu atau orang-orang sok elit itu, karena yang mereka warisi memang budaya begitu. Nah, saya pikir: tugas kita inilah untuk berusaha memperluas horison mereka. Mereka ini orang-orang yang berpikir mikro. Orang-orang yang berpikir mikro mudah sekali dibonekakan. Masyarakat yang demikian, mudah sekali

mencari pemimpin yang mau mengomando mereka. Orang Jawa Katakan "*Tumbu oleh tutup*" ("bejana mendapatkan katupnya!" *red.*) ya... cocok!

Saya yang dididik menjadi orang swasta, sering merasa kasihan bila melihat ibu-ibu pegawai negeri itu yah... kasihan! Padahal mungkin mereka bahagia. Sampai di hari Minggu pun harus gerak jalan... titit... titit...! Kasihan toh! Untuk seragam saja gaji mereka harus dipotong. Masih harus meninggalkan anak-anak atau kesempatan berlibur. Tetapi mungkin sekali saya salah tangkap. Bila kita melihat ibu-ibu itu gerak jalan, mereka bukannya malu-malu atau ogah...! Malah sebaliknya... Bangga! Dalam hati boleh jadi mereka berkata: "Hai... kalian orang pinggiran. Maka minggir! Saya *kan* lain! Saya elit, tokoh, titit... titit...!"

DD: *Bila dikaitkan dengan istilah "tumbu oleh tutup" apakah itu yang menjelaskan bahwa, dalam analoginya, social engineering itu sangat disukai?*

YBM: Disukai sekali! Siapa pun, atau lebih tepat, banyak orang, tanpa *a priori*, suka! Mereka memang menggerutu, tetapi menggerutu tentang gaji yang sedikit dan sebagainya. Tetapi sistemnya mereka sukai. Ini ada awal mulanya: karena sistem sekolah kita juga tidak pernah mendidik **personalities**. Kita selalu mendidik gerombolan. Bila terus begitu kita tidak akan pernah lagi mengharapkan generasi yang terdidik seperti generasi Soekarno-Hatta: yang bisa berpikir!

Saya mempunyai dugaan bahwa generasi muda yang sempat bersekolah di luar negeri, akan menemukan bentuk-bentuk pendidikan yang sama dengan apa yang diikhtiarkan oleh politik etik Belanda yang memang sungguh mendidik dan jadi pendidik, generasi yang berkaliber Soekarno-Hatta,

yang nanti justru akan menjadi nasionalis dan pendidik yang baik. Tetapi anehnya, sama juga dengan mereka yang ditatar oleh Orde Baru. Ternyata ada yang justru melawan praktek-praktek Orde Baru. Gejala ini sudah saya lihat dalam suatu pertemuan besar KNPI di Solo, misalnya. Ada seorang taruna AKABRI, di lengan balok-balok emas dan tali komandan di pundaknya minta bicara. Interesan sekali, dia berani mengatakan secara lantang di muka publik bahwa "yang harus dididik itu bukan kami-kami yang muda, tetapi justru kaum tua koruptor-koruptor itu." Tentu saja kontan mereka dimarahi oleh seorang mayor jenderal yang hadir. Juga di muka umum. Jadi bagi saya ini suatu fenomena yang interesan: mungkin juga akan datang berbagai *counter-vailing movements*.

DD: *Bagaimana mungkin membayangkan itu kalau disiplin, dalam arti menjalankan kekuasaan atas rakyat-gerombolan itu, berjalan sangat ketat?*

YBM: Memang hebat. Tetapi ini hanya akan berjalan dalam jangka waktu pendek tertentu. Dus, tidak abadi. Saya sudah lama melontarkan konstatasi bahwa generasi ini sebetulnya sudah pasca-nasional, pasca-Indonesia.

DD: *Dalam arti apa? Saya tidak mengerti!*

YBM: Dalam arti mereka tidak lagi seperti bapak-bapak mereka. Bagi mereka, pribadi mereka, pribadi sendiri, itu semakin lebih penting. Tidak berarti bahwa ini harus berjalan menuju individualisme. Tetapi pengertian tentang pribadi dan kolektivitas akan menemukan titik imbang. Lain dari sekarang ini, era gerombolan.

Nah, dalam kebudayaan pasca-nasional bagi generasi baru soal nasionalisme sudah bukan problem lagi. Mereka sudah mampu mengatasi problem kebangsaan Indonesia. Me-

reka tetap mengakui identitas mereka sebagai manusia Indonesia, tetapi mereka dengan mudah tanpa konflik batin menyerap *human values* yang lebih besar dari segenap penjuru bumi dan zaman.

DD: *Di satu pihak kelihatan seolah-olah tumbuh gejala pasca-nasional; tapi di pihak lain tumbuh nasionalisme baru yang sempit.*

YBM: Dalam pengamatan saya nasionalisme sempit adalah gejala kejang-kejang sekarat dari suatu generasi zaman yang sedang lampau. Orang Jawa, ketika nasionalisme Indonesia dirintis, juga justru memperlihatkan diri *semakin Jawa*. Mengujar bahwa kebudayaan Jawalah yang paling luhur. Sastra Jawalah yang paling canggih. Budaya Jawa bagi mereka lebih luhur dari budaya Indonesia. Apa yang terjadi? Kejawaan tetap hidup, tetapi teratasi, terangkat ke dalam kesadaran baru: menjadi warga Indonesia.

Jadi saya kira, kalau kita belajar dari sejarah, adanya super-nasionalisme seperti sekarang ini, adalah "normal." Itu gejala generasi yang sedang menghadapi akhir vitalitas, karena mereka sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman baru. Tidak berarti bahwa nasionalisme akan hilang. Akan diatasi! Diperkaya, diperluas horisonnya, bertambah dimensinya. Arti pasca itu bukan cuma *post* dalam bahasa Inggris, tetapi meningkat dimensi, lebih mendalam kesadaran, lebih luas horison, lebih manusiawi, lebih komprehensip dan seterusnya.

DD: *Tapi coba kita lihat, misalnya, propaganda "Aku Cinta Indonesia". Ini sejalan dengan kampanye-kampanye cinta poduksi Indonesia, apreasiasi film Indonesia. Juga sejalan dengan drive untuk ekspor non-migas. semua ini untuk menjawab suatu soal yang sedang berlangsung. Ada suatu perubahan besar, dari substitusi im-*

por masuk ke dalam drive ekspor yang besar. Esensinya adalah menciptakan adanya modal pribumi yang kuat.

YBM: Ini suatu harapan. Tetapi bagi massa rakyat, pribumi atau non-pribumi sebetulnya soalnya sama.

DD: *Harapan yang memang sedang dilaksanakan. Dengan deregulasi ekonomi misalnya.*

YBM: Saya ngomong dengan Cina-cina di Semarang, di pecinan, kebetulan Cina yang dagang alat televisi. Orang Cina itu *kan* terkenal realisme dan pragmatisme mereka. Saya tanya: dengan deregulasi itu siapa yang diuntungkan? "Wah.. yang diuntungkan itu hanya mereka yang bermodal besar. Sedangkan kami yang tergolong pengusaha menengah ke bawah saja sudah dibuat susah, apalagi yang pribumi." Jadi artinya menurut realisme Cina itu: deregulasi tidak untuk rakyat.

DD: *Di sini letak soalnya. Orang salah membayangkan apa itu nasionalisme. Dikiranya nasionalisme itu sama dengan populisme. Nasionalisme bisa mengambil bermacam-macam bentuk seperti fasisme, totalitarianisme.*

YBM: Karena itu perlu sekali kita jelaskan kepada generasi muda, bahwa Pemerintah itu tidak selalu identik dengan Negara. Pemerintah tidak identik dengan Bangsa Indonesia. Pemerintah tidak identik dengan Pembangunan Bangsa Indonesia. Mereka harus tahu itu. Kalau sudah tahu perbedaan itu, lalu bisa menilai bahwa kita itu selalu dicekoki dengan paham bahwa *bangsa Indonesia itu identik dengan pemerintah Indonesia*. Pembangunan nasional itu seolah-olah selalu sama dengan pembangunan rakyat. Akibatnya, kontradiksi-kontradiksi itu sudah enggak kelihatan. Jadi dalam soal pembangunan ini harus selalu ditanyakan: pembangunan untuk sia-

pa? Dan dengan korban apa dan siapa?

DD: *Justru pertanyaan itu tidak bisa atau malah tidak boleh diajukan.*

YBM: Tentu! Tapi ini harus dipertanyakan kepada manusia hiper-nasionalis yang selalu mengatakan *right or wrong, my country*. Bagi manusia pasca-nasional, pembangunan *okey*, tapi demi siapa? Dan atas pengorbanan siapa? Ini harus diuji dulu dalam fakta nyatanya.

DD: *Apakah memang ada* drive *ke arah hiper-nasionalisme tersebut?*

YBM: Ada! Untuk memberikan kesan bahwa pemerintah itu identik dengan negara, identik dengan bangsa, misalnya. Pembangunan nasional adalah pembangunan rakyat. Padahal ini masih harus dianalisa lagi. Jadi saya harapkan generasi pasca-nasional itu sanggup. Kalau belum sanggup, kita akan terkurung terus dalam masa lampau. Ya, masa Indonesia Raya itu. Di mana gerombolan saya dianggap primer.

Generasi pasca-nasional juga harus ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan tentang desa. Periksa dan cari tahu apa itu lomba desa itu. Jangan-jangan yang disebut sebagai lomba desa itu sebenarnya adalah *lomba pejabat* yang memerintah. Bukan lomba rakyat. Nah di sini kesulitan bagi generasi yang, katakanlah, sudah diindroktrinasi mengenai nasionalisme sempit itu tadi. Nasionalisme tetap penting, tetapi nasionalisme yang mana, yang demi siapa, mengorbankan siapa. Tugas kita sekarang adalah memberi horison baru, bahwa pandangan yang begitu-begitu itu hanya absah, sepanjang kamu masih suka menjadi gerombolan terhempas. Kalau kamu punya filsafat bahwa masyarakat primer itu adalah gerombolan, ya begitu: lomba desa, penataran, seragam untuk mengangkat

harkat. Tetapi kita, yang telah belajar dari seluk-beluk sejarah nyata dan arah evolusi manusia, kita harus berani menyumbangkan koreksi.

DD: *Baiknya tujuan itu tidak meragukan. Tetapi itu berarti kita takkan keluar dari debat lama bahwa semua itu bisa diselesaikan lewat pendidikan.*

YBM: Pendidikan itu hanya salah satu medium. Bukan satu-satunya! Tetapi tetap mahapenting.

DD: *Mana yang lain di luar pendidikan?*

YBM: Ada sarana-sarana lain, tentu saja. Misalnya, politik, pers, belajar berorganisasi *fair play*, mempengaruhi *public opinion*. Tentu saja tidak mudah, karena semuanya sedikit banyak harus berlangsung dalam medan magnet *trend* dunia. *Megatrend* dunia memang tidak menguntungkan bagi pemekaran kepribadian mandiri merdeka. *Megatrend* teknologi, ilmu pengetahuan, bisnis, industri besar, lebih suka pada gerombolan, massa mengambang.

DD: *Saya agak mempersoalkan pendidikan, karena begini. Misal-nya, kita berbicara tentang pejabat, pakaian seragam, penataran, pegawai. Semuanya menyangkut suatu struktur birokrasi. Kalau kita bicara tentang lomba desa, juga itu kan lomba pejabat. Maksud saya, ini hanya kelihatannya saja seperti lomba desa, tetapi sebenarnya lomba pejabat. Tetapi di balik itu semua, bagi pejabat sebenarnya adalah lomba pribadi, dan sekelompok orang untuk menjadi pejabat. Di sana menjadi pejabat adalah suatu sumber kehidupan, karena itu dia tidak bisa lagi lepas dari itu. Kalau dia mau jadi seorang yang memimpin di desa, dia harus menjadi pejabat di desa. Artinya, dia harus ikut penataran, harus punya seragam. Membayangkan perubahan, maka perubahan itu harus menyentuh inti-inti dari sumber-sumber kehidupan itu sendiri. Artinya harus ada sumber nafkah yang lain yang kuat di luar dunia ke-pejabat-an itu.*

YBM: Dengan kata lain, manusia pegawai, manusia yang serba tergantung harus diubah menjadi manusia swasta. Manusia merdeka. Nah ini bisa lewat pendidikan, bisa juga lewat sentuhan-sentuhan lain yang mungkin lebih ampuh. Susahnya, pendidikan kita juga sudah tenggelam di dalam sistem ini.

Dalam tiga puluh tahun ini kita tidak punya lagi sekolah dalam arti sejati. Kita hanya membangun lembaga-lembaga, di mana anak-anak itu menghapal, agar mereka menjadi sekrup mekanisme yang taat. Jadi selama 30 tahun itu, tidak ada sekolah sebenarnya. Selain beberapa kekecualian juga tidak ada lagi guru. Yang ada: penatar, instruktur, pawang. Ternyata pendidikan tenggelam dalam *power system*. Sekolah bukan tempat menghapal. Maka harus ada suatu *counter-education*. Kalau tidak, maka bangsa kita akan terus merosot menjadi bangsa kuli babu lagi. Atau panda-panda dalam sirkus. Jadi soalnya sekarang adalah bagaimana kita bisa menyusun suatu masyarakat di mana orang-orang kita sungguh-sungguh menjadi manusia merdeka, manusia yang tuan-tuan dan puan-puan sejati.

DD: *Kalau Romo bicara tentang mengubah manusia pegawai menjadi manusia swasta, manusia merdeka, sekarang ini memang itulah yang sedang berlangsung, paling tidak secara resmi. Inti dan isi dari hingar-bingar deregulasi adalah menciptakan jalan menuju yang swasta itu.*

YBM: Ya! Itu kata anda, orang swasta. Tapi bukan itu konsep yang *genuine* dari Pemerintah. Pemerintah terpaksa --dengan menggerutu-- melakukan deregulasi. Maka pemerintah sendiri belum melakukan deregulasi secara sungguh-sungguh. Deregulasi itu akibat banyaknya desakan. Pemerin-

tah, dari kodratnya, tidak suka. Menteri Arifin Siregar (Menteri Perdagangan, pada waktu itu; *DD*) berbicara tentang *Indonesia Incorporated*. Tetapi dari pihak lain, massa rakyat juga tidak akan tertolong dengan deregulasi total gaya liberal pasaran bebas plong. Ini memang masalah sulit. Yang jelas, strategis *Indonesia Incorporated* kodratnya tidak memungkinkan deregulasi atau... manusia merdeka.

Filsafat *big business, big industry, big high technology* esensinya tidak suka pada manusia merdeka. Atau lebih tepat rakyat yang merdeka. Perusahaan pesawat terbang yang mahal sekali dan proyek-proyek canggih spektakuler hanya mungkin, di mana tidak ada deregulasi yang sungguh-sungguh, karena hanya bisa berjalan jika ada injeksi modal besar-besaran dari pemerintah. Jadi hanya bila berjalan atas fasilitas pemerintah. Dari pihak lain, saya bisa membayangkan, bahwa negara-negara industri maju suka pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Demikianlah kita tak hanya menghadapi pemerintah kita sendiri, tetapi juga menghadapi *super-powers* ekonomi dunia. Pemerintah-pemerintah mereka sebetulnya lebih suka sistem ekonomi seperti ini. Walaupun dengan menggerutu, tetapi lebih gampang mengeruk secara sentral; dan terjamin stabilitasnya sekaligus.

DD: *Jadi teknologi dan industri/bisnis besar sangat menuntut adanya sistem seperti sekolah unggul ini?*

YBM: Betul!

DD: *Dengan kata lain, kalau Indonesia berusaha melakukan perkembangan teknologi yang kelewat mahal hampir tidak mungkin serentak juga deregulasi.*

YBM: Tidak mungkin! Kecuali bila *artificial* dipaksa-paksakan. Lalu teknologi amat canggih dan hal itu dikerjakan da-

lam pulau buatan yang tentu saja amat mahal juga. Tetapi biasanya barang hidup yang tidak alamiah tidak sehat juga.

DD: *Sekolah bibit unggul salah satu pulau itu?*

YBM: Tunggu saja. Kita tidak boleh a-priori. Tetapi dalam logika makronya saya tidak heran, ada cetusan sekolah bibit unggul semacam itu. (*Daniel Dhakidae*)